



dispari
KABUPATEN
MOJOKERTO

Mojokerto
Full of Majapahit Greatness



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

2025



0321-321194



dispari.mojokertokab.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi, tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, tanggapan maupun saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca, demi kesempurnaan dan kelancaran dalam pencapaian target kinerja kedepannya.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Penyajian LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan pangan dan perikanan di Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, Februari 2026

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Pembina Utama Muda
NIP 19721026 199201 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dengan total 13 indikator kinerja dan 13 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dan dengan 6 indikator kinerja dan 6 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 9 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 %	179,93 %	179
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	4446 Kkal/Kap/Hari	4453 Kkal/Kap/Hari	100,2
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	65 gram/Kap/hari	74,39 gram/kap/hari	114
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk	90	97,6	108
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	94,10	95,8	102
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Sesuai Potensi	172.219 Kg	183.339 Kg	106

2	Meningkatnya Produksi Perikanan				
		Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai Potensi	1.790.655 Kg	1.816.618 Kg	101
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Portensi	3.622.716 Kg	4.235.135 Kg	119
		Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Mojokerto	49.40 Kg/Kapita/Tahun	50,46 Kg/Kapita/Thun	102

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	82,27	100,3
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,90 %	87,46 %	95
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85 (Tinggi)	85,89 Tinggi	101
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	1	50%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,5	83,02	94,88
	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	90	97,6	108,4
Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.790.655 Kg	1.816.618 Kg	101
	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	172.219 Kg	183.339 Kg	106
	Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Potensi	3.622.716 Kg	4.235.135 Kg	119
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	82,27	100,3

Kinerja keuangan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 7.720.492.161,00 atau 87,46 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 8.313.264.649,00.

Capaian kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	9
I.1 Latar Belakang	9
I.2 Gambaran Umum	10
I.3 Isu-isu Strategis.....	14
I.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
II.1 Penjenjangan Strategis.....	20
II.2 Indikator Kinerja Utama	27
II.3 Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
III.1 Pengukuran Kinerja	36
III.2 Analisis Kinerja	40
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya	47
III.4 Akuntabilitas Anggaran.....	49
<u>BAB IV</u> PENUTUP	53

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel I.1	11
Tabel II.1.a	20
Tabel II.1.b	24
Tabel II.2.a	27
Tabel II.2.b	28
Tabel II.3.a	31
Tabel II.3.b	32
Tabel II.3.c	33
Tabel II.3.d	33
Tabel III.1.a	34
Tabel III.1.b	36
Tabel III.2.a.....	43
Tabel III.2.b	45
Tabel III.3	45
Tabel III.4	46
Tabel III.5	47
Tabel III.6	48

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar I.1	13
Gambar III.3	46

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada Bupati Mojokerto, Gubernur, Kepala Bappenas, Menpan RB dan Mendagri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *clean government* yaitu Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah, maka Laporan Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

I.2 Gambaran Umum

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdiri sejak awal 2017, merupakan gabungan dari Dinas Perikanan dan Peternakan serta Kantor Ketahanan Pangan, sedangkan pada 2021 bersamaan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional sekaligus ada perubahan nomenklatur pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, sehingga jabatan pengawas menjadi pejabat fungsional, kecuali Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Dinas Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan struktur organisasinya terdiri atas :

- a. Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Produksi Perikanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Usaha dan Agribisnis Perikanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Kelompok jabatan fungsional yang ada di Sekretariat terdiri atas : Fungsional Perencana dan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah, namun saat ini posisi fungsional keuangan pusat dan daerah masih belum terisi sejak

Kasubag Keuangan pensiun pada 2022. Sedangkan pejabat fungsional di bidang pangan adalah :

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- b. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
- c. Pengawas Makanan Hasil Pertanian Ahli Muda dan Madya

Pejabat fungsional di bidang perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda
- b. Analis *Aqua Culture* Ahli Muda
- c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda

d. Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan Rencana Kerja sebagai berikut : 8 (delapan) Program, 14 (empatbelas) Kegiatan dan 35 (tigapuluh lima) Sub Kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan.

- e. Pada 2025 Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto didukung sumber daya manusia sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

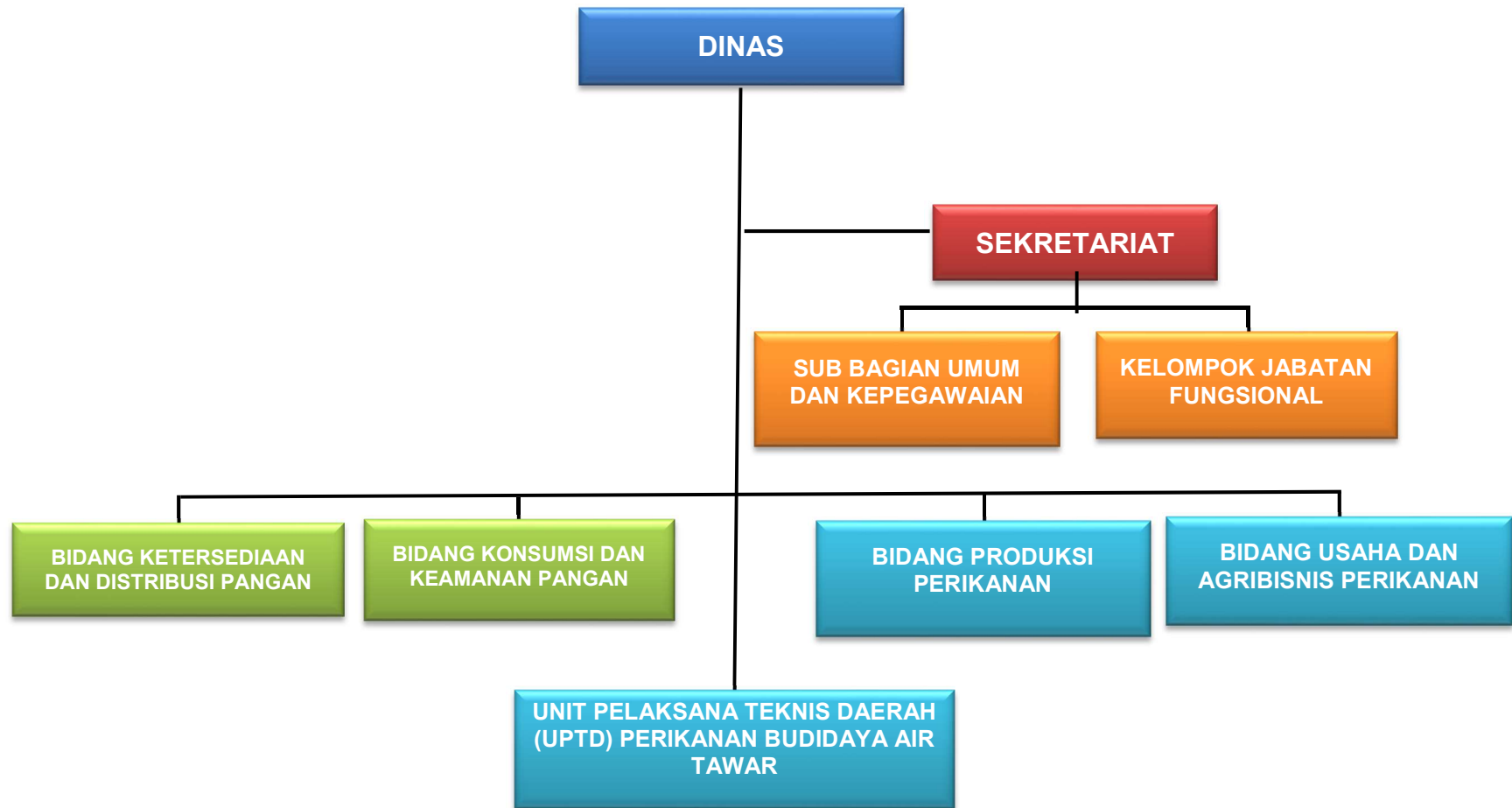
Tabel I.1
Kondisi SDM Dinas Pangan dan Perikanan
Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	ASN	34
2	CPNS	1
3	PPPK	1
4	ASN Penyuluh Perikanan (Pusat)	6
5	PPPK Penyuluh Perikanan (Pusat)	5
6	THL	5
Jumlah		52

Sumber : Subag Umpeg Dispari

Pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) orang pejabat yang purna yaitu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, saat ini sebagai pelaksana tugas adalah Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan. Demikian juga Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar masih kosong dan sebagai pelaksana tugas masih Kepala Bidang Produksi Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, berikut disampaikan bagan struktur organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto :



Sumber : Perbup Mojokerto Nomor 86 Tahun 2021

Gambar 1.2

I.3 Isu-isu Strategis

Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, energi, dan air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan-permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keniscayaan. Sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Pemenuhan kebutuhan dan menjaga ketahanan pangan masyarakat menjadi tugas penting Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Eksistensi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun regional. Fungsi dari Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sangatlah strategis dengan permasalahan dan isu-isu penting yang berkembang, antara lain :

Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :

- (a) Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.
- (b) Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah:
 - Infrastruktur distribusi.
 - Sarana dan prasarana pasca panen.
 - Pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah.
 - Sistem informasi pasar.
 - Keterbatasan lembaga pemasaran daerah.
 - Hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi.
 - Kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan.
 - Adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.
- (c) Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena:
 - Masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen,

- Harga pangan dunia semakin tidak menentu akibat adanya perang Rusia dan Ukraina, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

2. Cadangan pangan.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :

- (a) Sistem cadangan pangan daerah selain beras (daging, telur, sayuran, bawang merah, bawang putih) untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam ataupun non alam minimal 3 (tiga) bulan
- (b) Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya
- (c) Sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan, Poktan, TTI ataupun lembaga usaha lainnya

3. Rendahnya pasokan utama pangan pokok sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan

Bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh wilayah konsumen sepanjang waktu. Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja sistem distribusi di Kabupaten Mojokerto. Harga yang terlalu berfluktuasi dapat merugikan petani produsen, pengolah, pedagang hingga konsumen, berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan dimaksudkan untuk memperlancar pasokan dan memfasilitasi keterjangkauan

masyarakat, sekaligus memproteksi sistem ekonomi dalam daerah dari persaingan yang kurang menguntungkan khususnya tekanan perdagangan global. Isu terkini terkait kelangkaan minyak goreng, hal ini menandakan bahwa distribusi stok pangan yang ada pada distributor berjalan lambat. Demikian juga dengan naiknya harga kedelai di pasaran, berkurangnya pengembangan kedelai lokal karena menghadapi beberapa tantangan berupa alih fungsi lahan di daerah potensial dan persaingan penggunaan lahan dengan komoditas pangan strategis lainnya. Kedua permasalahan tersebut di atas membuat Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto segera mengambil tindakan dengan lebih intensif melakukan sidak pada gudang-gudang distributor yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto.

4. Rendahnya angka produksi perikanan dan hanya cukup memenuhi konsumsi ikan domestik

Ada beberapa faktor penyebab rendahnya produksi ikan di Kabupaten Mojokerto, antara lain terbatasnya area penangkapan ikan yang terbatas pada sungai dan waduk, mengingat Kabupaten Mojokerto wilayahnya lebih banyak daratan daripada perairan, selain itu pemanfaatan sungai yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Di samping itu peralatan yang digunakan masih sederhana serta harga ikan konsumsi masih dipengaruhi oleh tengkulak. Selain hal tersebut, harga pakan yang relatif tinggi juga sangat besar pengaruhnya terutama terhadap budidaya perikanan

5. Kurangnya akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai ketahanan pangan

Saat ini pertanyaan yang timbul adalah dapatkah Kabupaten Mojokerto memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau bagi kelompok miskin serta tidak merusak lingkungan? Selanjutnya untuk mengetahui pentingnya keamanan bahan pangan untuk kesehatan masyarakat, melalui berbagai upaya dan memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk dapat memilih dan memilih produk pangan yang berkualitas dan baik untuk kesehatan pada masyarakat serta memenuhi B2SA. Perubahan preferensi dan gaya hidup konsumen dalam memilih pangan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Mojokerto, di sepanjang rantai pangan untuk dapat bersama-sama

menjaga keamanan pangan. Oleh karena itu, sinergisme dan keterpaduan kajian risiko keamanan pangan sangat penting untuk meningkatkan kontribusi kajian risiko sebagai landasan ilmiah dalam program keamanan pangan, antara lain dengan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*bleaching*) dan atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan, Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar. Sejak pertengahan 2021, ketika Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) mendelegasikan wewenang ke pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pangan dan Perikanan bergerak cepat dengan membentuk OKKPD Kabupaten Mojokerto selanjutnya melakukan sampling ke beberapa pasar di wilayah Kabupaten Mojokerto terkait keamanan pangan, selanjutnya mengirimkan hasil uji ke laboratorium di Surabaya. Apabila hasilnya aman untuk dikonsumsi, maka bahan lokal tersebut diterbitkan izin edarnya, dengan sasaran utama para pelaku usaha penggilingan padi, pengusaha sayur, buah organik dan pedagang sayur/buah di pasar

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :
 - (a) Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Oleh karena itu ada SDG's *Acceleration Frame Work* (MAF). Metodologi MAF adalah kerangka metodologi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan *stakeholders* berupa pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan *bottleneck* dalam upaya mencapai target SDG's dengan kategori *off-track* sekaligus mempercepat solusi untuk memecahkan *bottleneck* tersebut.

(b) Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah:

- belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya
- belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta
- belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal
- rendahnya citra pangan lokal
- belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.

7. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :

- (a) Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap rasa, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
- (b) Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
- (c) Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKj Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Dengan mengacu pada sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai penjabaran atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2021-2025 serta Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, serta dengan memperhatikan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib bidang pangan dan perikanan, maka ditetapkan tujuan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah ***Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Unggulan Daerah.***

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjejanan strategisnya sebagai berikut :

Tabel II.1.a

Matriks Penjenjangan Strategis sesuai Dokumen Perencanaan 2021-2025

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi				PDRB Sektor Perikanan	
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan			Persentase Ketersediaan Pangan	100 %
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,26
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja yang efektif	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100 %
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %
			Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan peralatan perlengkapan kantor	12 bulan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan	12 bulan
			Penyediaan Bahan Material	Jumlah waktu penyediaan bahan material yang disediakan	12 bulan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu	12 bulan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	12 bulan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 bulan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	4 orang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan / perpanjangan perizinan	30 kendaraan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	4 gedung
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan
			Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	20 %
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	2 kelompok
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah kelompok penerima bantuan pembangunan infrastruktur lumbung pangan	2 kelompok
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	97 %
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan dan Laporan harga Pangan	13 dokumen
			Penyediaan informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	1 dokumen
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberi bantuan benih pangan lokal	2 kelompok
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pengawasan distribusi dan harga pangan	12 laporan
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelompok penerima bantuan pengembangan , jumlah waktu penyediaan operasional TTIC Kab. Mojokerto	2 kelompok 12 bulan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana	90 ton
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana	90 ton
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu penyediaan biaya pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 bulan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	53 desa
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen PPH Konsumsi dan identifikasi jenis Tanaman Pangan P2L	2 dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan	1 laporan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	53 desa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan yang ditangani	8 %
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	2 desa
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab/Kota	Jumlah Desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	2 desa
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Jumlah Kecamatan Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50 %
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Jumlah Lokasi Pengawasan Keamanan Pangan	10 lokasi
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha pangan	50 orang
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan barang usaha pangan sebagai fasilitas menuju sertifikasi	2 kelompok
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan usaha yang bergerak di bidang PSAT	9 kecamatan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kab/Kota	Jumlah lokasi pengambilan sampel mutu keamanan pangan	10 lokasi
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 %
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air LAINnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6 kali
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen data dan Informasi	1 dokumen
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3 kelompok
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3 kelompok
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10%
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Budidaya yang Menerima Bantuan, Pembinaan dan Pemantauan	6 kelompok
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidayaan ikan	1 dokumen
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Produksi Benih dan Calon Induk	3.000.000 ekor

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator	Target
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah kelompok penerima sarana pembudidayaan ikan	6 kelompok
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dala 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah kelompok yang dilakukan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	15 unit usaha
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pelaksanaan temu teknis/usaha pembudidayaan ikan	2 kali
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2%
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sosialisasi Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	6 kali
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil	Jumlah Sosialisasi, Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	6 kali
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan skala mikro dan kecil	4 kelompok
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah kab/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan skala mikro dan kecil	4 kelompok

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah :

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dinas Pangan dan Perikanan dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan perikanan, mendukung pencapaian misi ke-3:

Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjejaran strategisnya :

Tabel II.1.b
Matriks Penjejaran Strategis sesuai Dokumen Perencanaan 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
Meningkatnya daya saing ekonomi berdasarkan lapangan usaha			PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	69.693.602,00
Meningkatnya Ketahanan			Indeks Ketahanan Pangan	87,50
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja yang efektif	82
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	91 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN	85
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 stel
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	55 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90 %
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket
Penyediaan Bahan Material			Jumlah paket bahan material yang disediakan	33 paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah laporan fasilitasi tamu	2 laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 %

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	90 %
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	4 unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit
			Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah desa yang diberi bantuan pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	1 desa
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan	4 unit
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	4 unit
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (%)	82,72 %
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya pengawasan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	3 dokumen
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen
			Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah usaha Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang dikembangkan	2 unit
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	12 laporan
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	-
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana	20 ton
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 ton
			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Tersalur	10 ton
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	18 desa
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan	4.6 %
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	1 dokumen
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan	94 %
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	10 unit usaha
			Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5 dokumen
			Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota	1 dokumen
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1 %
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan dan Pemantauan Kepada Nelayan	10 orang
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	10 unit
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan perikanan budidaya	2 %
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kepada pembudidaya ikan	40 orang
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	1 unit
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	4 unit
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pembudidayaan ikan di darat	15 unit
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2 %
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan	30 unit usaha
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	30 pelaku usaha

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Dinas Pangan dan Perikanan memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Tabel II.2.a

Indikator Kinerja Utama (Tahun Perencanaan 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pangan	%	Produksi padi x rendemen + stok	Neraca Akses Pangan Jatim
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	Kkal	$Fd = O - \Delta St + M - X - (F + S + I + W + Rou)$	Neraca Bahan Makanan Kab. Mojokerto
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	Gram	$Fd = O - \Delta St + M - X - (F + S + I + W + Rou)$	Neraca Bahan Makanan Kab. Mojokerto
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	Nilai	Jumlah ketersediaan diversifikasi pangan —————X100% Jumlah konsumsi pangan	Laporan Analisis Konsumsi Pangan Berdasarkan PPH Kab. Mojokerto

		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	%	$\frac{\text{Jumlah PSAT aman}}{\text{Jumlah PSAT yang diuji}} \times 100 \%$	Laporan Hasil Uji Lab di Kab. Mojokerto
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Kg	$\frac{(\text{Jumlah Produksi Th N} - \text{Jumlah Produksi Th N-1})}{\text{Jumlah Produksi Th N-1 Sebelumnya}} \times 100\%$	Laporan Statistik Perikanan Budidaya
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Kg	$\frac{\text{Produksi ke (n)} - \text{Produksi ke (n-1)}}{\text{Produksi ke (n-1)}} \times 100 \%$	Laporan Statistik Perikanan Budidaya
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Kg	$\frac{\text{Produksi ke (n)} - \text{Produksi ke (n-1)}}{\text{Produksi ke (n-1)}} \times 100 \%$	Laporan Statistik Pengolahan Hasil Perikanan
		Angka Konsumsi Ikan	Kg/kap/th	Konsumsi Ikan Dalam Rumah Tangga + Konsumsi Ikan Di Luar Rumah Tangga + Konsumsi Ikan Tidak Tercatat	Statistik Perikanan

Berikut juga disampaikan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan dokumen perencanaan tahun 2025-2029 :

Tabel II.2.b

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 \alpha_i X_{ij}$	Badan Pangan Nasional
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	Nilai	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan diversifikasi pangan}}{\text{Jumlah konsumsi pangan}} \times 100\%$	Laporan Analisis Konsumsi Pangan Berdasarkan PPH Kab. Mojokerto
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Kg	$\frac{(\text{Jumlah Produksi Th N} - \text{Jumlah Produksi Th N-1})}{\text{Jumlah Produksi Th N-1 Sebelumnya}} \times 100\%$	Laporan Statistik Perikanan Budidaya
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Kg	$\frac{\text{Produksi ke (n)} - \text{Produksi ke (n-1)}}{\text{Produksi ke (n-1)}} \times 100\%$	Laporan Statistik Perikanan Budidaya
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Kg	$\frac{\text{Produksi ke (n)} - \text{Produksi ke (n-1)}}{\text{Produksi ke (n-1)}} \times 100\%$	Laporan Statistik Pengolahan Hasil Perikanan

Sesuai dengan table II.2.b tersebut di atas dapat dijelaskan formulasi-formulasi untuk mengetahui hasil capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

a. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan merupakan instrument pengukuran komposit yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan, kinerja dan kerawanan pangan di wilayah provinsi, kabupaten maupun kota di Indonesia yang mengukur aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan untuk menentukan prioritas intervensi program seperti penurunan stunting dan peningkatan ketahanan gizi. IKP disusun berdasarkan 9 (sembilan) indikator utama untuk Kabupaten dan 8 (delapan) indikator untuk Kota yang meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu :

 **Aspek Ketersediaan** : Kecukupan pangan = *rasio konsumsi vs ketersediaan bersih*

 **Aspek Aksesibilitas** : Keterjangkauan = *persentase penduduk miskin, rumah tangga dengan pengeluaran pangan tinggi dan infrastruktur (listrik)*

 **Aspek Pemanfaatan** : *angka harapan hidup, stunting, air bersih dan rasio tenaga kesehatan*

Pengelompokan wilayah (*grouping*) berdasarkan nilai IKP terdapat 6 (enam) kategori :

1. Prioritas 1 (sangat rentan)
2. Prioritas 2 (rentan)
3. Prioritas 3 (agak rentan)
4. Prioritas 4 (agak tahan)
5. Prioritas 5 (tahan)
6. Prioritas 6 (sangat tahan)

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah angka yang menggambarkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan penduduk dengan nilai ideal 100 yang menunjukkan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang. PPH dihitung berdasarkan 9 (Sembilan) kelompok pangan yaitu : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta bumbu-bumbuan. Penganekaragaman atau konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) terus didorong untuk meningkatkan skor PPH konsumsi.

c. Tingkat Produksi Perikanan Budidaya

Tingkat produksi perikanan budidaya bisa dihitung melalui total volume atau kuantitas ikan maupun biota air lainnya yang dihasilkan dari usaha pemeliharaan terkelola (tambak, kolam, keramba) dalam jangka waktu tertentu.

d. Tingkat Produksi Perikanan Tangkap

Total volume hasil penangkapan ikan dan organisme akuatik lainnya dari sumber daya alam perairan laut maupun perairan darat (umum) di pelabuhan perikanan atau lokasi tertentu.

e. Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Tingkat produksi pengolahan hasil perikanan adalah jumlah volume atau nilai produk akhir (hasil olahan) yang dihasilkan dari bahan baku ikan/biota air melalui serangkaian proses (pembekuan, pengeringan, pengalengan, dll) dalam kurun waktu tertentu. Pengolahan bertujuan meningkatkan nilai tambah dan mutu produk, meliputi olahan tradisional maupun modern.

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025 terdapat 2 versi yaitu sesuai dengan tahun

perencanaan 2021-2025 sedangkan tahun perencanaan 2025-2029 juga mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini.

Tabel II.3.a
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan 2021-2025)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 %	179,93 %	179
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	4446 Kkal/Kap/Hari	4453 Kkal/Kap/Hari	100,2
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	65 gram/Kap/hari	74,39 gram/kap/hari	114
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk	90	97,6	108
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	94,10	95,8	102
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Sesuai Potensi	172.219 Kg	183.339 Kg	106

2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai Potensi	1.790.655 Kg	1.816.618 Kg	101
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Portensi	3.622.716 Kg	4.235.135 Kg	119
		Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Mojokerto	49.40 Kg/Kapita/Tahun	50,46 Kg/Kapita/Thun	102

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	82,27 (A)	103
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91.90 %	87,46 %	95
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85 (tinggi)	85 (tinggi)	101
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan		2 inovasi	1	50

Penetapan anggarannya sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana table II.3.b berikut :

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Rp. 6.118.040.800,00
2	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 1.000.000.000,00
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 140.000.000,00
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 10.000.000,00
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 40.000.100,00
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 15.000.000,00
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 500.000.000,00
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 46.696.373,00

Tabel II.3.c Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen Perencanaan tahun 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,5	83.02	94,88
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	90	97.6	108,4
2	Meningkatnya produksi perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.790.655 Kg	1.816.618 Kg	101
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	172.219 kg	183.339 Kg	106
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	3.622.716 kg	4.235.135 Kg	119

3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82	82,27	100,3
---	---	----------------	----	-------	-------

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut :

Tabel II.3.d
Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Rp. 5.820.413.800,00
2	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 980.354.000,00
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 501.332.000,00
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 14.000.000,00
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 26.768.100,00
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 11.225.000,00
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 589.040.000,00
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 220.131.569,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2025, dengan capaian tahun sebelumnya dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dinyatakan “berhasil” karena rata-rata capaian kinerja untuk tahun perencanaan 2021-2026 adalah 103 %, sedangkan rata-rata capaian kinerja tahun perencanaan 2025-2029 adalah 105,8 %.

Mayoritas indikator telah tercapai dengan baik, walaupun masih ada indikator yang perlu ditingkatkan. Berikut pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sbb :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 11 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;

Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel III.1.a
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 %	179,93 %	179

		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	4446 Kkal/Kap/Hari	4453 Kkal/Kap/Hari	100,2
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	65 gram/Kap/hari	74,39 gram/kap/hari	114
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk	90	97,6	108
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	94,10 %	95,8 %	102
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Sesuai Potensi	172.219 Kg	183.339 Kg	106
		Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai Potensi	1.790.655 Kg	1.816.618 Kg	101

		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Portensi	3.622.716 Kg	4.235.135 Kg	119
		Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Mojokerto	49.40 Kg/Kapita/Tahun	50,46 Kg/Kapita/Tahun	102

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu :

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (Tinggi)	82,27 (Tinggi)	100.3
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,90 %	87,46 %	95
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85 (Tinggi)	85,39 (Tinggi)	101
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	1 Inovasi	50

Selanjutnya Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,5					83,02	94,88 %
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	90					96,7	108,4 %
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.790.655 Kg	460.500 kg	445.760 kg	447.498 Kg	462.860 Kg	1.816.618 Kg	101 %
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	172.219 Kg	46.477 kg	58.300 Kg	42.032 Kg	36.530 Kg	183.339 Kg	106 %
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	3.622.716 Kg	1.550.507 kg	599.269 kg	988.553 Kg	1.096.806 Kg	4.235.135 Kg	119 %
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82					82,27	100 %

Sesuai dengan indikator-indikator tersebut pada tabel III.1.b capaian pada indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan tidak dapat dihitung capaiannya per triwulan karena pengukurannya dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dan dirilis pada akhir tahun berjalan atau awal tahun berikutnya. Demikian juga dengan indikator kinerja capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi baru dilakukan rilis

capaian saat akhir tahun berjalan atau awal tahun berikutnya karena indikator yang digunakan untuk mengukur capaian menggunakan data SUSENAS.

III.2 Analisis Kinerja

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian 3 (tiga) target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja.

Pada tahun 2025, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja, yang disusun berdasarkan perencanaan tahun 2021-2025 yang memiliki 4 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja dan 2 kinerja lainnya dengan 4 indikator kinerja, serta perencanaan tahun 2025-2029 yang lebih sederhana dengan 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja, namun sasaran strategisnya masih ada kesamaan dengan tahun perencanaan yang sebelumnya (2021-2025). Berikut disampaikan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perjanjian kinerja periode perencanaan tahun 2021-2025 :

a. Sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan mempunyai 4 indikator kinerja

1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama :

Sesuai dengan data Provity 2025 atau data produksi tahun 2025 yang terdiri atas data luas panen, produktivitas dan data produksi setelah data dihitung dan diolah, dengan analisa bahwa pada 2025 luas panen padi diperkirakan sebesar 49,39 hektar dengan produksi padi sekitar 319.821 ton Gabah Kering Giling (GKG). Apabila dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2025 diperkirakan sebesar 181.609,42 ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi riil adalah 83.520 ton sehingga surplus sebesar 98.089,42 ton atau sebesar 179,93 % ketersediaan pangan utama berupa beras.

2. Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi :

Indikator berikutnya merupakan data yang diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, yang disusun antara lain untuk bahan evaluasi untuk pengadaan, penggunaan dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi sesuai rekomendasi kecukupan gizi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 serta untuk penyusunan Pola Pangan Harapan tingkat ketersediaan. Adapun Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi Kabupaten Mojokerto pada 2025 tercapai 4453 Kkal/Kapita/Hari dari target 4446 Kkal/Kapita/Hari

3. Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Mojokerto tahun 2025 menunjukkan bahwa ketersediaan protein hewani mengalami kenaikan sebesar 8 gram/kapita/hari (67.96 %), sehingga angka kecukupan gizi tingkat ketersediaan energi sebesar 74,39 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan protein didominasi oleh penyediaan dari sumber nabati. Secara umum ketersediaan energi dan protein pada 2025 masih lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan 63 gram/kapita/hari

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi dan protein serta PPH ketersediaan adalah :

- 1.1 Peningkatan produksi dan konsumsi sumber pangan nabati alternatif berupa kacang-kacangan
- 1.2 Mengoptimalkan produksi sumber alternatif dari padi-padian, serta peningkatan produksi kelompok sayur dan buah dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia seperti lahan marginal, ruang terbuka dan pekarangan sesuai potensi sumberdaya lokal

4. Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan

Mengingat keterbatasan anggaran, penghitungan persentase keamanan pangan dilaksanakan dengan melakukan sampling hanya di 2 (dua) pasar wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu di pasar Mojosari dan pasar Kedungmaling. Komoditi yang diambil sebagai sampling adalah serelia, sayuran, buah-buahan dan rimpang, meliputi beras, kacang hijau, jeruk, wortel, kunyit, kubis, mentimun, selada, tomat dan stroberi yang beredar di Kabupaten Mojokerto yang relatif banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Komoditi sebagai uji sampling tersebut selanjutnya dikirim ke laboratorium dengan parameter *e-coli*, *salmonella sp*, *logam berat pb*. Uji laboratorium pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dilakukan bertujuan memastikan bahwa PSAT yang beredar di pasar bebas dari cemaran serta untuk menghitung persentase keamanan pangan di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini bisa juga disebut pengawasan *post market*. Sesuai dengan hasil uji laboratorium terhadap sampling PSAT yang ada di pasar bahwa persentase keamanan pangan di Kabupaten Mojokerto pada 2025 adalah 95,8 %. Persentase masih di atas angka keamanan pangan nasional yaitu 85 %. Perlu disampaikan bahwa pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan / atau menjadi bahan baku pengolahan pangan. Termasuk juga pangan yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan.

Sedangkan standar keamanan pangan meliputi : harus bersih / mencuci tangan sebelum mengolah makanan, memisahkan penyimpanan pangan mentah dan matang untuk mencegah kontaminasi silang, masak dengan seksama dan matang, simpan pangan pada suhu aman agar terhindar dari *danger zone* serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

- b. Sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Tingkat Produksi Perikanan Budidaya :

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Mojokerto pada 2025 dari target 1.790.655 kg kemudian realisasi sebesar 1.816.618 Kg atau realisasi 101 %. Mengingat pengaruh kondisi cuaca atau iklim yang relatif stabil, para pembudidaya ikan juga telah mendapatkan pembinaan cara budidaya ikan yang baik dan bersertifikasi sehingga berpengaruh pada produksi perikanan budidaya walaupun ada sedikit persentase penurunan dibandingkan persentase capaian realisasi di tahun 2024 yaitu 108 % dari target, masih sangat jauh dibandingkan dengan capaian realisasi perikanan budidaya Provinsi Jawa Timur yang sebesar 15.754.611,52 ton, sedangkan capaian nasional sebesar 6,7 juta ton di tahun 2024

2. Tingkat Produksi Perikanan Tangkap :

Produksi perikanan tangkap adalah hasil tangkapan yang dilakukan di perairan

laut dan perairan umum baik yang didaratkan oleh pelabuhan maupun non pelabuhan. Data produksi perikanan tangkap Kabupaten Mojokerto pada 2025 mengalami kenaikan, dari target 172.219 Kg tercapai 183.356 Kg atau 106 % hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Adanya kebijakan dan pendampingan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terutama Dinas Pangan dan Perikanan bersama tenaga Penyuluh Perikanan yang memberikan bimbingan teknis, perbaikan kualitas data produksi, serta perbaikan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- 1.2. Peningkatan kompetensi dan keahlian nelayan
- 1.3. Ketersediaan air yang stabil di perairan umum daratan sepanjang tahun 2025 sehingga penagakan ikan dapat dilakukan dalam waktu yang panjang.

Masih sangat jauh capaian produksi perikanan tangkap Kabupaten Mojokerto jika dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Timur yang sebesar 7.330.890,97 ton terutama tangkapan laut. Sedangkan capaian realisasi produksi perikanan tangkap nasional pada 2024 adalah 7,85 juta ton.

3. Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Industri pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai outputnya. Produksi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Mojokerto masih didominasi produksi krupuk ikan di Kecamatan Kutorejo merupakan sentra industrinya. Sedangkan produk-produk olahan lain berupa abon ikan, keripik kulit ikan, nugget ikan dan sentra kuliner ikan wader di Trowulan merupakan pengungkit tingkat produksi pengolahan perikanan. Pada 2025 produksi pengolahan terdapat peningkatan signifikan, mengingat adanya beberapa komoditas olahan ikan yang dimasukkan pada data pengolahan, yang mana target 2024 adalah 1.012.406 kg terealisasi 3.551.682 kg sedangkan pada 2025 dari target 3.622.716 kg tercapai sebesar 4.235.135 kg atau sebesar 119 %.

4. Angka Konsumsi Ikan

Sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi di Kabupaten Mojokerto disamping melakukan kampanye GEMARIKAN, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto juga menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Masak Ikan. Berdasarkan Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

bahwa ada peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Mojokerto tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 49,34 kg per kapita per tahun, dan pada 2025 tercapai 50,46 kg/kapita/tahun. Perlu disampaikan bahwa angka konsumsi ikan Jawa Timur pada 2024 53,3 kg/kapita/tahun. Sedangkan angka konsumsi ikan nasional pada 2024 sebesar 63,05 kg/kapita/tahun.

c. Sasaran Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel terdapat 3 (tiga) indikator kinerja

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada 2025 nilai SAKIP Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah 82,27, ada kenaikan nilai dibandingkan tahun 2024 yaitu 80,81. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pada Dinas Pangan dan Perikanan juga menunjukkan kenaikan.

2. Persentase Realisasi Anggaran

Pada 2025 realisasi anggaran Dinas Pangan dan Perikanan adalah sebesar 87,46 % dari target 91,90 %, terdapat penurunan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 91,88 %

3. Indeks Profesionalitas ASN

Sebagai alat ukur kualitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan, target yang dipasang Dinas Pangan dan Perikanan terkait IP ASN pada 2025 adalah 85 tercapai 85,39 terdapat kenaikan capaian dibanding tahun sebelumnya yaitu 84,07 pada 2024.

Pada perubahan tahun anggaran 2025, Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan mengalami perubahan yang menyesuaikan perencanaan tahun 2025-2029 dengan beberapa perubahan pada Sasaran Strategis maupun Indikator Kinerja yang lebih sederhana dan terukur, sebagaimana sudah disampaikan pada table II.3 dengan penjelasan dan formulasi yang hamper sama dengan Perjanjian Kinerja periode perencanaan 2021-2025.

Berikut juga disampaikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya :

Tabel III.2.a
Perbandingan Realisasi Kinerja (sesuai Dokumen Perencanaan 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	204 %	216,1 %	216,03 %	170 %	179,93 %	100 %	100 %
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	4687,56 kkal/kap/hr	2111,8 kkal/kap/hr	2968 kkal/kap/hr	4446 kkal/kap/hr	4453 kkal/kap/hr	2400 Kkal/kap/hr	100 %
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	92,83 gr/kap/hr	60,68 gr/kap/hr	82,06 gr/kap/hr	63,25 gr/kap/hr	74,39 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	100 %
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk				89,35	97,6	89,1	100 %
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan			93 %	94 %	95,8 %	93 %	100 %
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap sesuai potensi	159.120 kg	165.800 kg	112.765 Kg	170.514 kg	183.339 kg	175.629 kg	100 %
		Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai potensi	1.418.300 kg	1.559.500 kg	1.575.600 Kg	1.750.904 kg	1.618.816 kg	1.961.247 kg	100 %
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Potensi	973.093 kg	973.240 kg	992.589 Kg	3.551.682 Kg	4.235.135 kg	1.053.307 kg	100 %
		Angka Konsumsi Ikan			48,17 kg/kap/thn	49,34 kg/kap/thn	50,46 kg/kap/thn	47 kg/kap/thn	100 %

3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100 %	117,5 %					
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,17	87,68 %	88.42 %				
		Indeks Profesionalitas ASN		75	87,90				
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,16	70,29	77,87				
		Nilai RB Perangkat Daerah							
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan							

Berdasarkan tabel III.2.a di atas bahwa perbandingan capaian realisasi kinerja mulai tahun 2021-2025 bersifat fluktuatif, namun beberapa capaian terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk Indikator Kinerja perubahan pada tahun 2025, terdapat 1 indikator baru yaitu Indeks Ketahanan Pangan, yang pada 2025 ini tercapai angka 83,02 dari target 87,5. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan, bahwa Kabupaten Mojokerto menempati prioritas 6 (sangat tahan), menduduki peringkat 1 se Jawa Timur serta peringkat 9 nasional.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang baru dimasukkan pada perubahan perencanaan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto pada tahun ke-3 yaitu :

1. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk
2. Persentase Keamanan Pangan yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan
3. Angka Konsumsi Ikan

Tabel III.2.b
Perbandingan Realisasi Kinerja
(sesuai dengan dokumen perencanaan 2025-2029)

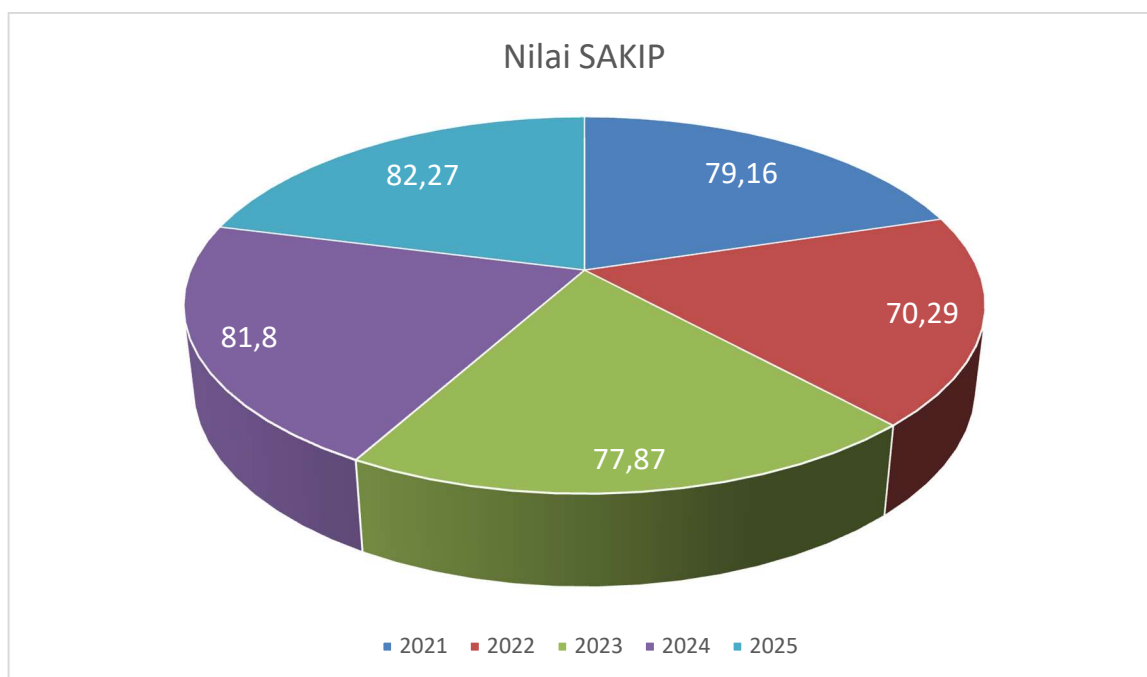
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2024	2025		
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan		83,02	88.5	100 %
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	89,35	97.6	91	100 %
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budaya	1.750.904 Kg	1.816.618 Kg	1.938.263 kg	100 %
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	170.514 Kg	183.356 Kg	179.211 kg	100 %
		Tingkat Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	3.551.682 Kg	4.235.135 Kg	3.921.344 kg	100 %
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.80	82,27	84 (A)	100 %

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Akuntabilitas kinerja pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan yang relatif bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat pada capaian nilai SAKIP tiap tahun yang sedikit ada peningkatan. Pada 2021 awal tahun perencanaan, nilai SAKIP Dispari adalah 79,16 kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan karena ada beberapa dokumen yang tidak bisa dilampirkan tapi masih masuk kategori BB yaitu 70,29 atau tercapai hanya 88 % dari target, selanjutnya di tahun 2023 tercapai nilai 77,87, di tahun 2024 tercapai nilai 81,80 dan di tahun 2025 tercapai 82,27.

Perkembangan capaian nilai SAKIP Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto bisa dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar III.3 Perbandingan Nilai SAKIP 2021-2025



Sedangkan apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP antara Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur bisa dilihat pada tabel III.4 berikut :

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai SAKIP
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jatim	94,69 (AA)
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Jatim	88,78 (A)
3	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	82,27 (A)

Disamping capaian akuntabilitas kinerja yang relatif baik, terdapat juga penghargaan kinerja baik dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada 2024 mendapatkan penghargaan terkait pemanfaatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) peringkat ke-4, yang mana sebagai upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari tunai menjadi non tunai berbasis digital. Selanjutnya di tahun yang sama, meraih beberapa penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Beberapa penghargaan yang diraih dapat disampaikan pada tabel berikut :

Tabel III.5

**Daftar Penghargaan Prestasi Kinerja
Dinas Pangan dan Perikanan**

No	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Keterangan
1	Juara I Lomba Cipta Menu Kategori Beragam Tingkat Provinsi Jawa Timur	2021	Pemprov. Jatim
2	Forikan Award Kategori Program Kerja Teraktif	2022	Ketua Forikan Jatim
3	Pencapaian Forikan Kab. Mojokerto yang Berperan Aktif dalam Pembentukan Kesekretariatan Forikan di Tingkat Kecamatan dan Desa	2024	Ketua Forikan Jatim
4	Juara Favorit Kategori Menu Keluarga dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jatim Tahun 2024	2024	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim
5	Championship ETPD Terbaik ke V	2024	Bupati Mojokerto
6	Forikan Kabupaten Mojokerto Berperan aktif sebagai penggiat POSYANDU melalui Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	2025	Ketua Forikan Jatim

III.4 Akuntabilitas Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2025, didukung APBD sebesar Rp. 8.313.264.469,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.270.492.161,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) atau 87,46 %. Berikut disajikan realisasi anggaran pada Program Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 :

Tabel III.6
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.820.413.800,00	Rp. 5.481.646.638,00	94,2 %
2	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 980.354.000,00	Rp. 427.283.521,00	43,58 %
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 641.332.000,00	Rp. 588.437.704,00	91,75 %
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 24.000.000,00	Rp. 23.241.600,00	96,84 %
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 26.768.100,00	Rp. 25.513.734,00	95,31 %
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 11.225.000,00	Rp. 10.777.800,00	96,02 %
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 589.040.000,00	Rp. 516.215.624,00	87,63 %
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 220.131.569,00	Rp. 197.375.540,00	89,66 %

Sesuai dengan tabel di atas, bisa dilihat bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran program relatif bagus, kecuali pada Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang mana capaian realisasi anggarannya hanya 43,58 %. Hal ini disebabkan adanya wan prestasi yang telah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur lumbung pangan masyarakat di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang yang merupakan Rencana Program Pengembangan Kawasan Perdesaan 2024-2028. Namun progres pembangunannya tetap diselesaikan sedangkan anggarannya akan diajukan pada saat Perubahan APBD 2026.

Setelah melihat capaian realisasi anggaran sebagaimana table di atas, selanjutnya akan dibandingkan antara capaian anggaran dan capaian kinerja sebagaimana table berikut :

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Rp	Realisasi Rp	Capaian
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,5	83,02	94,88 %	1.591.186.100	965.797.697	60.7 %
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	90	97,6	108,4 %	81.268.000	73.165.128	90 %
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.790.655 kg	1.816.618 kg	101 %	589.040.000	516.215.624	87.63 %
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	172.219 kg	183.356 kg	106 %	11.225.000	10.777.800	96 %

		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	3.622.716 kg	4.235.135 kg	119 %	220.131.569	197.375.540	89.7 %
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	82,27	100,3 %	5.820.413.80 0	5.481.646.63 8	94.2 %
			Rata-rata Capaian		104,93 %	Total Capaian		86.37 %

Tabel III.5 menunjukkan perbandingan antara capaian kinerja dengan anggaran, sehingga bias dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja adalah 104,93 % dan capaian anggaran sebesar 86,37 %, efisiensi kinerja pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 18.56 %.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pangan dan perikanan yang secara ringkas mempunyai fungsi perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan perikanan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan uraian dan data-data pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pada 2025, capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, dari 3 (tiga) sasaran strategis, 6 (enam) indikator kinerja, rata-rata tercapai di atas 100 %.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, menunjang keberhasilan dari capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan solusi yang ditempuh pada tahun-tahun mendatang akan dilakukan upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari seluruh unsur dalam Perangkat Daerah, mulai pelaksana hingga pimpinan, agar nilai SAKIP Perangkat Daerah bisa meningkat lagi. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) agar bisa mencapai target 98 %, dengan melakukan pembinaan, promosi dan sosialisasi terkait keanekaragaman konsumsi pangan yang Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat, karena PPH dapat digunakan untuk menilai mutu pangan penduduk.

Disamping itu program yang capaiannya sudah melampaui target tetap dipertahankan sehingga dapat menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto serta dapat menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto serta dapat menunjang keberhasilan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada akhir tahun Renstra 2025-2029.

Secara umum pelaksanaan program-program pada Dinas Pangan dan Perikanan dalam rangka pencapaian sasaran pada 2025, tidak menghadapi kendala yang berarti, namun demikian guna meningkatkan kinerja yang hamper tercapai dan mempertahankan capaian kinerja yang telah tercapai hingga akhir RPJMD maupun

Renstra Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2026, perlu terus melakukan kinerja, antara lain dengan :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui bimtek / pelatihan sesuai tugas dan fungsi yang akan berpengaruh pada peningkatan kinerja organisasi ;
- 2) Penentuan skala prioritas program yang mendukung percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029 ;
- 3) Indikator kinerja yang sudah mencapai ≥ 100 % tetap dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang, agar tidak mengalami penurunan
- 4) Berupaya memperoleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi maupun dari APBN, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat / kelompok guna mendukung pencapaian target kinerja
- 5) Peningkatan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Penerimaan Piagam Penghargaan dari Ketua FORIKAN Jawa Timur



Pemberian bantuan paket budidaya ikan



Kunjungan Bapak wakil bupati Mojokerto ke UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar



Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Olahan Ikan

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2025)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2026) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2026 (%)		Predikat Penilaian				
							I		II		III		IV		I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
1	Terwujudnya tata kelola Birokrasi perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah()					81,00																									
2		[PROGRAM] 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(undefined)	39.942.449.231	21.480.067.641	81,00	5.820.413.800	1.736.136.974	1.767.962.123	1.153.017.502	1.163.297.201	0,00	1.310.704.855	0,00	1.543.318.888	0,00	1.203.457.676	82,27	1424165219	82,27	5.481.646.638	26.961.714.279,00			67,50		SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI					
3		[KEGIATAN] 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target(%)	135.000,00	51.678.400	90,00	8.600.000	0,00	4.900.000	0,00	2.300.000	0,00	1.150.000	90,00	250.000	0,00	2000000	0,00	2375000	0,00	400000	87,50	2374000	87,50	7.149.000	58.827.400,00		43,58	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			3,00	4.300.000	1,00	3.100.000	1,00	500.000	0,00	450.000	1,00	250.000	1,00	1.000.000	1,00	1.250.000	0,00	200.000	1,00	1.774.000	3,00	4.224.000					SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI		

4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				2,00	4.300.000	1,00	1.800.000	0,00	1.800.000	1,00	700.000	0,00	0	1,00	1.000.000	0,00	1.125.000	1,00	200.000	0,00	600.000	2,00	2.925.000					SA NG AT TIN GG I	SE DA NG	
3		[KEGIATAN] 2.09.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		36.20 2.949.231		19.26 6.512.698	91,00	5.242.137.000	0,00	1.599.616.370	0,00	1.600.307.659	0,00	1.057.943.138	91,00	984.269.833	0,00	1252 6954 09	0,00	1436 8971 79	0,00	1104 9710 18	87,46	1176 7864 35	87,46	4.971.350.041		24.237.862.739,00		66,95	SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				37,00	5.242.137.000	9,00	1.599.616.370	9,00	1.600.307.659	9,00	1.057.943.138	10,00	984.269.833	9,00	1.252.695.409	9,00	1.436.897.179	9,00	1.104.971.018	10,00	1.176.786.435	37,00	4.971.350.041					SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I	
3		[KEGIATAN] 2.09.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		1.088.500.000		564.465.888	90,00	158.676.800	0,00	64.805.750	0,00	47.448.150	0,00	15.817.000	90,00	30.605.900	0,00	8845.000	0,00	3805.300	0,00	3098.1250	90,00	9048.6000	90,00	134.117.550		698.583.438,00		64,18	SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				6,00	42.863.800		2.220.900		7.770.000		5.217.000		27.655.900	0,00	0	0,00	0	6,00	17.343.750	0,00	23.841.000	6,00	41.184.750					SA NG AT RE ND AH	SA NG AT TIN GG I	
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				2,00	10.000.000	0,00	2.500.000	1,00	3.000.000	0,00	3.000.000	1,00	1.500.000	0,00	0	1,00	2.425.000	0,00	0	1,00	0	2,00	2.425.000					SA NG AT TIN GG I	SA NG AT RE ND AH	
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				6,00	30.000.000	0,00	30.000.000	0,00	0	0,00	0	6,00	0	0,00	400.000	0,00	980.300	3,00	9.220.000	3,00	12.143.000	6,00	22.743.300					SA NG AT TIN GG I	SE DA NG	

4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.0 6.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				33,00	58.713.000	2,00	20.634.850	0,00	33.078.150	31,00	5.000.000	0,00	0	2,00	3.470.000	0,00	0	3,00	1.530.000	28,00	51.127.000	33,00	56.127.000					SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.0 6.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)				2,00	2.000.000	1,00	600.000	0,00	600.000	0,00	600.000	1,00	200.000	1,00	800.000	0,00	0	0,00	387.500	1,00	0	2,00	1.187.500					SA NG AT TIN GG I	RE ND AH
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12,00	15.100.000	3,00	8.850.000	3,00	3.000.000	3,00	2.000.000	3,00	1.250.000	3,00	4.175.000	3,00	400.000	3,00	2.500.000	3,00	3.375.000	12,00	10.450.000					SA NG AT TIN GG I	SE DA NG
3		[KEGIATAN] 2.09.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)				759.000.000	624.731.455	90,00	187.000.000	0,00	46.750.402	0,00	52.749.864	0,00	46.749.864	90,00	40.749.870	0,00	32414446	0,00	43712859	0,00	38990508	95,00	40749534	95,00	155.867.347	780.598.802,00	102,85	SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12,00	115.000.000	3,00	28.750.402	3,00	28.749.864	3,00	28.749.864	3,00	28.749.870	3,00	20.414.446	3,00	19.712.859	3,00	20.990.508	3,00	22.749.534	12,00	83.867.347					SA NG AT TIN GG I	SE DA NG
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12,00	72.000.000	3,00	18.000.000	3,00	24.000.000	3,00	18.000.000	3,00	12.000.000	3,00	12.000.000	3,00	24.000.000	3,00	18.000.000	3,00	18.000.000	12,00	72.000.000					SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I

3		[KEGIATAN] 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1.757.000.000		972.679.200	90,00	224.000.000	0,00	20.064.452	0,00	65.156.450	0,00	31.357.500	90,00	107.421.598	0,00	14750000	0,00	56528550	0,00	28114900	90,00	113769250	90,00	213.162.700		1.185.841.900,00		67,49	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				30,00	62.000.000	0,00	12.902.750	0,00	13.400.000	10,00	24.682.500	20,00	11.014.750	0,00	11.800.000	0,00	6.000.000	8,00	19.624.900	22,00	15.162.000	30,00	52.586.900					SANGAT TINGGI	TINGGI	
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				1,00	135.000.000	0,00	286.702	1,00	44.981.450	0,00	0	0,00	89.731.848	0,00	0	1,00	42.288.550	0,00	2.320.000	0,00	89.557.250	1,00	134.165.800					SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				40,00	27.000.000	5,00	6.875.000	12,00	6.775.000	13,00	6.675.000	10,00	6.675.000	5,00	2.950.000	12,00	8.240.000	9,00	6.170.000	14,00	9.050.000	40,00	26.410.000					SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	
1	Meningkatnya produksi perikanan		Persentase peningkatan produksi perikanan(%)				2,00																										

2		[PROGRAM] 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap(%)		1.194.000.000	210.890.218	1,00	11.225.000	0,00	0	0,00	600.000	0,00	9.615.000	1,00	1.010.000	0,00	0	0,00	600.000	0,00	0	7.5	10177800	7,50	10.777.800		221.668.018,00		18,57	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
3		[KEGIATAN] 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Nelayan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan (Orang)		1.194.000.000	210.890.218	10,00	11.225.000	0,00	0	0,00	600.000	0,00	9.615.000	10,00	1.010.000	0,00	0	0,00	6000.000	0,00	0	10,00	10177800	10,00	10.777.800		221.668.018,00		18,57	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4		[SUB KEGIATAN] 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia(Unit)				10,00	11.225.000	0,00	0	0,00	600.000	10,00	9.615.000	0,00	1.010.000	0,00	0	0,00	600.000	0,00	0	10,00	10.177.800	10,00	10.777.800					SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
2		[PROGRAM] 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya(%)		5.548.000.000	3.943.728.835	2,00	589.040.000	0,00	113.542.400	0,00	25.295.600	0,00	349.192.000	2,00	101.010.000	0,00	4.982.700	0,00	100.942.522	0,00	5.182.000	3.75	405108402	3,75	516.215.624		4.459.944.459,00		80,39	SANGAT TINGGI	TINGGI
3		[KEGIATAN] 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan (Orang)		5.548.000.000	3.943.728.835	40,00	589.040.000	0,00	113.542.400	0,00	25.295.600	0,00	349.192.000	50,00	101.010.000	0,00	4982700	0,00	100942522	0,00	5182000	50,00	405108402	50,00	516.215.624		4.459.944.459,00		80,39	SANGAT TINGGI	TINGGI

4		[SUB KEGIATAN] 3.25.04.2.0 4.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota(Unit)				1,00	135.625.000	0,00	113.542.400	0,00	21.473.400	0,00	609.200	1,00	0	0,00	4.982.700	0,00	98.132.522	0,00	2.512.000	1,00	19.620.420	1,00	125.247.642					SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
4		[SUB KEGIATAN] 3.25.04.2.0 4.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota(Unit)				4,00	447.400.000	0,00	0	0,00	0	4,00	346.390.000	0,00	101.010.000	0,00	0	0,00	0	0,00	500.000	5,00	384.487.982	5,00	384.987.982					SA NG AT TIN GG I	TIN GG I
4		[SUB KEGIATAN] 3.25.04.2.0 4.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat(Unit)				15,00	6.015.000	0,00	0	1,00	3.822.200	5,00	2.192.800	0,00	0	0,00	0	1,00	2.810.000	5,00	2.170.000	0,00	1.000.000	15,00	5.980.000					SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
2		[PROGRAM] 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan(%)		3.530.000.000	759.254.130	2,00	220.131.569	0,00	3.634.900	0,00	14.420.000	0,00	26.831.673	2,00	175.244.996	0,00	500.000	0,00	11.471.496	0,00	80.068.512	19	105335532	19,00	197.375.540		956.629.670,00		27,10	SA NG AT TIN GG I	TIN GG I
3		[KEGIATAN] 3.25.06.2.0 2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan (Pelaku Usaha)		3.014.000.000	647.110.330	30,00	220.131.569	0,00	3.634.900	0,00	14.420.000	0,00	26.831.673	30,00	175.244.996	0,00	500000	0,00	11471496	0,00	80068512	35,00	105335532	35,00	197.375.540		844.485.870,00		28,02	SA NG AT TIN GG I	TIN GG I

[illegible]

3	[KEGIATAN] 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya(Unit)		4.529.754.685		2.621.507.321	4,00	980.354.000	0,00	47.064.666	0,00	334.293.999	0,00	592.796.066	1,00	6.199.269	0,00	5151.000	0,00	3394.956	0,00	8394.748	1,00	4103.42817	1,00	427.283.521		3.048.790.842,00		67,31	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH
4	[SUB KEGIATAN] 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia(Lainnya)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia(Unit)					4,00	980.354.000	0,00	47.064.666	0,00	334.293.999	0,00	592.796.066	4,00	6.199.269	0,00	5.151.000	0,00	3.394.956	0,00	8.394.748	1,00	410.342.817	1,00	427.283.521					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2	[PROGRAM] 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan(%)		12.242.053.843		4.190.151.565	83,00	641.332.000	0,00	9.386.836	0,00	46.860.511	0,00	490.724.757	83,27	94.359.896	0,00	3.550.000	0,00	21.157.890	0,00	12.957.390	83,27	5507.72424	83,27	588.437.704		4.778.589.269,00		39,03	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
3	[KEGIATAN] 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Variasi harga pangan (CV %)(%)		2.503.215.051		576.201.300	35,00	40.064.000	0,00	3.739.385	0,00	7.548.360	0,00	14.296.891	2,33	14.479.364	0,00	2450.000	0,00	4465.152	0,00	1760.000	2,33	3032.7826	2,33	39.002.978		615.204.278,00		24,58	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

4		[SUB KEGIATAN] 2.09.03.2.0 1.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis(Laporan)					12,00	29.760.000	3,00	3.739.385	3,00	4.988.360	3,00	7.267.458	3,00	13.764.797	3,00	2.450.000	3,00	3.615.152	3,00	0	3,00	22.809.976	12,00	28.875.128					SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.03.2.0 1.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)(Dokumen)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)(Dokumen)					1,00	10.304.000	0,00	0	0,00	2.560.000	0,00	7.029.433	1,00	714.567	0,00	0	0,00	850.000	0,00	1.760.000	1,00	7.517.850	1,00	10.127.850					SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
3		[KEGIATAN] 2.09.03.2.0 2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah(Ton)		3.488.000.00		2.382.403.782	50,00	520.000.00	0,00	3.476.201	0,00	23.894.901	0,00	467.906.266	135,00	24.722.632	0,00	0	0,00	3649.000	0,00	2412.000	135,00	4702.08598	135,00	476.269.598		2.858.673.380,00		81,96	SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.03.2.0 2.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota(Ton)					0,68	470.000.00	0,00	2.071.200	0,00	1.307.400	0,00	466.047.600	3,67	573.800	0,00	0	0,00	1.774.000	0,00	1.212.000	3,67	466.861.728	3,67	469.847.728					SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.03.2.0 2.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota(Ton)					1,00	50.000.000	0,00	1.405.001	0,00	22.587.501	0,00	1.858.666	1,00	24.148.832	0,00	0	0,00	1.875.000	0,00	1.200.000	1,00	3.346.870	1,00	6.421.870					SA NG AT TIN GG I	SA NG AT RE ND AH

3		[KEGIATAN] 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)()		6.250.838.792		1.231.546.483	90,00	81.268.000	0,00	2.171.250	0,00	15.417.250	0,00	8.521.600	90,00	55.157.900	0,00	1100000	0,00	13043738	0,00	8785390	97,60	50236000	97,60	73.165.128		1.304.711.611,00		20,87	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun(Dokumen)					1,00	9.965.000	0,00	50	0,00	2.075.000	0,00	7.514.950	1,00	375.000	0,00	0	0,00	0	0,00	8.785.390	1,00	1.010.000	1,00	9.795.390					SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal(Laporan)					1,00	63.928.000	0,00	2.171.100	0,00	13.342.250	0,00	106.650	1,00	48.308.000	0,00	1.100.000	0,00	13.043.738	0,00	0	1,00	42.287.750	1,00	56.431.488					SANGAT TINGGI	TINGGI
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun(Laporan)					1,00	7.375.000	0,00	100	0,00	0	0,00	900.000	1,00	6.474.900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	6.938.250	1,00	6.938.250					SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
2		[PROGRAM] 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWAN	Persentase Desa rawan pangan(%)		1.050.000.000		157.537.449	4,6	24.000.000		2.033.334		1.016.667		6.874.066		14.075.933	0,00	0	0,00	1.150.000	0,00	875.000	4,3	21216600	4,30	23.241.600		180.779.049,00		17,22	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI

[illegible]

4		[SUB KEGIATAN] 2.09.05.2.0 1.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota(Dokumen)					1,00	8.418.100	0,00	1.075.000	0,00	5.611.000	1,00	1.363.600	0,00	368.500	0,00	1.075.000	0,00	5.217.500	1,00	1.424.534	0,00	240.000	1,00	7.957.034						SA NG AT TIN GG I	SA NG AT TIN GG I
4		[SUB KEGIATAN] 2.09.05.2.0 1.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan(Dokumen)					1,00	6.575.000	0		6.574.875	0		125	0,00	0	0,00	0	0,00	1,00	6.499.800	0,00	0	1,00	6.499.800						SA NG AT RE ND AH	SA NG AT TIN GG I	
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																								97.58%	7.270.492.161								

1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Triwulan I : Melakukan persiapan penyerapan anggaran sebelum periode triwulan yang ditetapkan sehingga pada saat periode yang seharusnya dilakukan, kinerjanya tidak mengalami hambatan.

Triwulan II : perencanaan dan penganggaran disiapkan dengan baik sehingga realisasi anggaran sesuai

Triwulan III : Koordinasi yang baik lintas sektor baik secara internal ataupun internal dan Tanggung jawab pegawai setiap kegiatan

Triwulan IV : Koordinasi yang baik lintas sektor baik secara internal ataupun internal dan Tanggung jawab pegawai setiap kegiatan

2. Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :

Triwulan I : Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa belanja perjalanan dinas harus dieliminasi

Triwulan II : beberapa sub kegiatan dilakukan pergeseran sehingga pencairan dilakukan setelah APBD Perubahan

Triwulan III : beberapa kegiatan menurunkan targetnya dikarenakan menyesuaikan dengan pagu efisiensi

Triwulan IV : Terjadinya wanprestasi oleh penyedia pada salah satu sub kegiatan

3. Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :

Triwulan I : 1) mencermati renkas dan segera merealisasikan anggaran ; 2) kerjasama tim yang baik

Triwulan II : -

Triwulan III : -

Triwulan IV : -

4. Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya :

Triwulan I : melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan kegiatan sub kegiatan perangkat daerah pendukung visi misi Kepala Daerah yang belum tercukupi dalam apbd agar dapat diusulkan dalam papbd

Triwulan II : melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan perangkat daerah pendukung visi misi kepala daerah

Triwulan III : -

Triwulan IV : Dilakukan penyesuaian target kinerja dengan anggaran yang tersedia agar lebih optimal untuk pencapaian kinerja



forikan
JAWA TIMUR



PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : 800.1.12.8/3311/120.5/2025

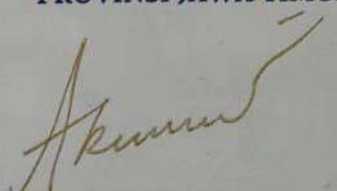
DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA :

Forum Peningkatan Konsumsi Ikan

KABUPATEN MOJOKERTO

Atas Pencapaian Sebagai Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang **Berperan Aktif** Sebagai Penggiat Posyandu Melalui Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

SURABAYA, 27 NOVEMBER 2025
KETUA FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
PROVINSI JAWA TIMUR


Ny. ARUMI BACHSIN EMIL DARDAK





PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : 800.1.12.8/ 3181 /120.5/2024

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA :
FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN

KABUPATEN MOJOKERTO

Atas Pencapaian Sebagai
Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Yang **Berperan Aktif** Dalam Pembentukan
Kesekretariatan Forikan di Tingkat Kecamatan dan Desa

Surabaya, 13 November 2024
Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Jawa Timur

Ny. ISYE SRI RAHAYU ADHY KARYONO





PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : 800.1.12.8/ 3182 /120.5/2024

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

Kabupaten Mojokerto



Atas Pencapaian Sebagai

"JUARA FAVORIT"

KATEGORI MENU KELUARGA

Dalam Pelaksanaan

"LOMBA MASAK IKAN TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024"

Pada Tanggal 18 Juli 2024 di Dyandra Convention Center Surabaya

Surabaya, 13 November 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Timur



Dr. Ir. MUHAMMAD ISA ANSHORI A.T.D., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19700916 199403 1 006



Pemerintah Kabupaten
MOJOKERTO



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KABUPATEN MOJOKERTO**

Memberikan :

Diagam Penghargaan

Kepada :

Dinas Pangan dan Perikanan

Sebagai

Terbaik Ke-V

"Championship ETPD Antar Perangkat Daerah SE-KABUPATEN MOJOKERTO Tahun 2024"

Mojokerto, 09 Desember 2024
BUPATI MOJOKERTO
Selaku Ketua TP2DD

dr. Ikfina Fahmawati, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Pembina Utama Muda
NIP 197210261992011002

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	4446 Kkal/Kap/hari
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	65 Gram/Kap/Hari
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk	90
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	94,10%
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap sesuai potensi	172219 kg
		Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai potensi	1790655 kg
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai potensi	3622716 kg
		Angka konsumsi Ikan Kab. Mojokerto	49.40 Kg/Kapita/Tahun

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,90 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	5.792.511.800,00	APBD 2025
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.000.000.000,00	APBD 2025
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	140.000.000,00	APBD 2025
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.000.000,00	APBD 2025
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	40.000.000,00	APBD 2025
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	460.000.000,00	APBD 2025
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	46.696.373,00	APBD 2025

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI MOJOKERTO

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Pembina Utama Muda
NIP 197210261992011002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Mokhamad Riduwan

Jabatan: Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa

Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mojokerto

Drs. Mokhamad Riduwan
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197210261992011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	4446 Kkal/Kap/hari
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	65 Gram/Kap/Hari
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk	90
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	94,10%
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap sesuai potensi	172219 kg
		Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai potensi	1790655 kg
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai potensi	3622716 kg
		Angka konsumsi Ikan Kab. Mojokerto	49.40 Kg/Kapita/Tahun

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,90 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	6.118.040.800,00	APBD 2025
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.000.000.000,00	APBD 2025
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	140.000.000,00	APBD 2025
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	10.000.000,00	APBD 2025
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	40.000.000,00	APBD 2025
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	15.000.000,00	APBD 2025
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	500.000.000,00	APBD 2025
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	46.696.373,00	APBD 2025

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mojokerto


Muhammad Albarraa


Drs. Mokhamad Riduwan
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197210261992011002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Mokhamad Riduwan

Jabatan: Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa

Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

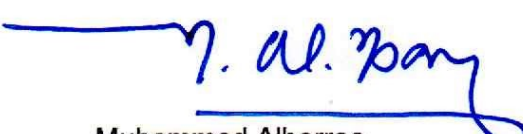
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

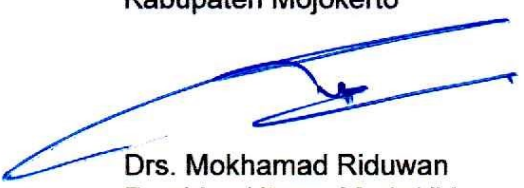
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mojokerto


Muhammad Albarraa


Drs. Mokhamad Riduwan
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197210261992011002

Lampiran

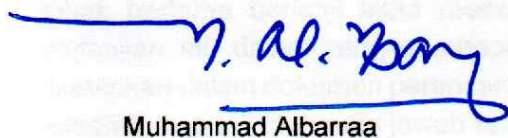
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,5
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	90
2	Meningkatnya produksi perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	179000655 kg
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	172219 kg
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	3622716 kg
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp 5.820.413.800,00	PAPBD 2025
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 980.354.000,00	PAPBD 2025
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 501.332.000,00	PAPBD 2025
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 14.000.000,00	PAPBD 2025
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 26.768.100,00	PAPBD 2025
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 11.225.000,00	PAPBD 2025
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 589.040.000,00	PAPBD 2025
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 220.131.569,00	PAPBD 2025

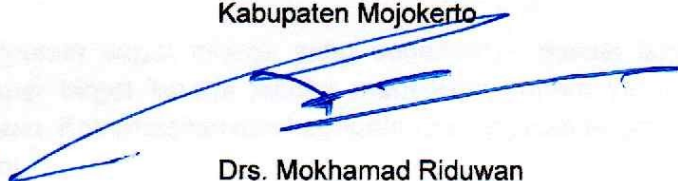
Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mojokerto



Drs. Mokhamad Riduwan
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197210261992011002